

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Andri, Munawar. (2019) Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Program Ilmu Administrasi. Universitas Islam Riau.
- Carolina Anita (2018), Tambarici *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan* Jurnal Riset Akuntansi 13(4), 175-181
- Effendi Taufiq. (2006) *Modul Indikator Kinerja Referensi untuk menentukan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah*. Kementerian Negara Pendayagunaan Apratur Negara, Jakarta.
- Fatmawati, Ana. (2018) *Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah*. 31-42.
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Lapananda, Yusran. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia, 2016.
- Mahmudi. (2007). *Mahmudi Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.

- Maulya Rozi, Fatriany (2019), *Pengelolaan Dana Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Melalui Implementasi Strategi* 1-112.
- Taek, Maximilianus Mario, dkk. (2020) *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 5(2),83-102.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, Bandung.
- Sujarweni. V. W (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Raharjo, T., Sulaeman, A.S., Sriyani. (2018) *Efektivitas Penggunaan Dana Desa, Bisman (Bisnis & Manajemen)*,1(2).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Drijen pembendaharaan Nomor. PER-41/PB/2014. Tentang penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

SusilowatiDwi (2013), *Analisis Peran Badan Usah Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)*.1-97

<https://riaunet.com/bpn-ici-berharap-jaksa-segera-periksa-kades-tenggayun-terkait-dugaan-penyelewengan-dana-desa/> diakses 1 Januari 2021

<https://www.suryaden.com-pp-43-Tahun-2014-Tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Dea>. Diakses 1 Januari 2021